

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 2014 - 2019

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
2019	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Mencabut: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397); 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • TETAP, masih sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum • PERLU DIUBAH/DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang ... putusan MK ... peraturan pemerintah/presiden ... peraturan kpu ... peraturan bawaslu ...), kompilasi peraturan untuk mempermudah pemahaman

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 851),</p> <p>Diubah dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan</p>		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum		
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	Masih Berlaku	<p>Mencabut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	Tetap
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik	Masih Berlaku	-		Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara				
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses	Masih Berlaku	Merubah: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang	untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilihan Umum	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemilihan Umum		Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum		
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota			Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan	<ul style="list-style-type: none"> • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan		Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187)		
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi terhadap pengaturan mengenai Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara • diundangkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat 	Kompilasi

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara			Pemungutan Suara	
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Merubah: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 	Tetap
2018	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan	Masih Berlaku	Mencabut: 1. Peraturan Badan		Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		<p>Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 994)</p> <p>2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun</p>		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1708)		
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh,	Masih Berlaku	Usulan Baru		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat				
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang	Masih Berlaku	Usulan Baru		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemantauan Pemilihan Umum				
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno	Masih Berlaku	Usulan Baru		
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	Masih Berlaku	Usulan Baru		
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Mencabut: ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37,		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46, dan Pasal 47 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum		
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Administratif Pemilihan Umum				
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu	Tidak Berlaku	-		
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Merubah: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas		Kompilasi

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara		<p>Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara</p> <p>Diubah dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,</p>		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara		
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masih Berlaku	Merubah: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	<ul style="list-style-type: none"> • mengikuti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum • untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 	
	12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan	Masih Berlaku	Perubahan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • mengikuti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum • untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 	

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	<ul style="list-style-type: none"> • mengikuti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum • untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 	
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14	Masih Berlaku	Mencabut: a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • mengikuti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum • untuk meningkatkan 	•

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		<p>Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 996); dan</p> <p>b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang</p>	efektivitas pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1710),		
	15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	•

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		
	16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 644) sepanjang mengatur mengenai tahapan Pencalonan anggota DPD	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	•
	17	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan 	•

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri		Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	
	18	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Perubahan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilihan umum	
	19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	Masih Berlaku	-	barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota				
	20	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Mencabut: ketentuan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	•
	21	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan	Masih Berlaku	Mencabut: 1. Peraturan Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 	•

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum		<p>Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792); dan</p> <p>2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773),</p>	<p>2017 tentang Pemilihan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	
	22	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan	Masih Berlaku	-	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13	

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi			Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti	
	23	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> •

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	24	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> •

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	25	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	•
	26	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum • pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum 	•
	27	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang	Masih Berlaku	Merubah: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang	<ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 	•

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum		Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilihan umum 	
	28	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Mencabut: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 849);</p> <p>Diubah dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan</p>		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	29	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum	Masih Berlaku	<p>Umum</p> <p>Mencabut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98); 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 848);		
	30	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Mencabut: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396);	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 847),		
	31	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu	Masih Berlaku	Mencabut: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga 	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
					perlu diganti	
	32	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-	untuk pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya	Perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
	33	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • mengikuti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum • untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kampanye pemilihan umum 	Tetap

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum				
2017	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 		
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum				
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-		
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-		
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum				
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-		
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum				
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-		
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 		
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		<p>Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota		
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota</p>		
	12	<p>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota</p>	Masih Berlaku	<p>Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 		
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota		Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota		
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 2, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 42 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Kota dan Wakil Wali Kota		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773		
	15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		<p>tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Logo, Pataka, Mars, dan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Masih Berlaku	Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Logo dan Pataka Pengawas Pemilu serta Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 		
	17	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum,	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri		Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan		
	18	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	Masih Berlaku	Merubah: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 	<ul style="list-style-type: none"> Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	<ul style="list-style-type: none">

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah <p>Diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum		
	19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri • Peraturan Badan Pengawas 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>Diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara</p> <p>2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas</p>		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara		
2016	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri				
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Walikota di Aceh		Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam		
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia	Masih Berlaku	-		
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	Tidak Berlaku	<p>Dicabut dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota		dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 		
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 		
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota				
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Masih Berlaku	-		
	12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota				
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Gubernur, Bupati, dan Walikota		Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota		
	14	Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Masih Berlaku	-		
2015	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama dan Tata	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Cara Pengisian Jabatan Secara Terbuka di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia				
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum	Berlaku Sebagian	Sebagian dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 		
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik	Masih Berlaku	-		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		<p>Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota</p>		<p>9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota</p>		
	5	<p>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Tidak Berlaku	<p>Dicabut dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Kota dan Wakil Wali Kota		
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-		
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara		Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 		
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum,	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan		<p>Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri</p> <p>Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 		
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Tidak Berlaku	<p>Dicabut dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				<p>Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota</p> <p>Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Kampanye 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Tidak Berlaku	<p>Dicabut dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota <p>Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Peraturan Badan Pengawas 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Masih Berlaku	Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 		
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota				
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota				
	15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019				
	16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum				
2014	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	2	Peraturan Badan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum		
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum		
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	7	Peraturan Badan	Tidak Berlaku	Dicabut dengan:		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum		
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa antarpeserta Pemilihan Umum				
	9	Peraturan Badan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia				
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum				
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11	Berlaku Sebagian	Sebagian dicabut dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pengawas 		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum		Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri				
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014				
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden				
	15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden				
	16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden				
	17	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden				
	18	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden				
	19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Presiden dan Wakil Presiden				
	20	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum		
	21	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum				
2013	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum		

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan		Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan		
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota				
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota				
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Kepala Daerah				
	12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota				
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	15	Peraturan Badan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri				
	16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2014				
2012	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahun 2012 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	6	Peraturan Badan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Logo dan Pataka Pengawas Pemilu serta Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota				
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri				
	11	Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum				
	12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia				
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum				
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran,				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
2011	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011 tentang ...				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang ...				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan				
2010	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan				
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan				
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2014				
2009	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengawas Pemilihan Umum di Luar Negeri				
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2009 tentang ...				
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Kabupaten/Kota				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang ...				
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2009 tentang ...				
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2009 tentang ...				
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden				
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mekanisme				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden				
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden				
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang ...				
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang ...				
	12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahun 2009 tentang ...				
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang ...				
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum				
	15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan, Pemilihan dan Penetapan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri				
	16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	17	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum				
	18	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	20	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	21	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	22	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	23	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	24	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	25	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemungutan dan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	26	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan, Pemilihan dan Penetapan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri				
	27	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan				
	28	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	29	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	30	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
2008	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2008 tentang ...				
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2008 tentang ...				
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum				
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan				
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum				
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan				
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		<p>dan Penetapan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri</p>				
	12	<p>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum</p>				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri				
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri				
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengadaan dan				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
2014	1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • TETAP, masih sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
	2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU)

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Perwakilan Rakyat Daerah				
	3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU)
	4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum melaksanakan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019)

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		dalam Pemilihan Umum	Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	tanggal 28 Maret 2019).
	5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU)

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 Di Luar Negeri	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU)
	7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU)

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota				
	8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • TETAP, masih sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
	9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • TETAP, masih sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia				
	10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • TETAP, masih sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
	11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor .11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangananan	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
				Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	<p>Umum Presiden dan Wakil Presiden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU)
	12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU)

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri		Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara		
	13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Penyusunan Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • TETAP, masih sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
					Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • TETAP, masih sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
	15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dan Peraturan KPU)

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
	16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU)
	17	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU)
	18	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden		Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri	Presiden <ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 	perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU)
	19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum melaksanakan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019).
	20	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil	Tidak Berlaku	Dicabut dengan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 	<ul style="list-style-type: none"> • DIGANTI, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, adanya perubahan hukum (undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan

TAHUN	NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS PERATURAN	KETERANGAN	DASAR PEMBENTUKAN / PERUBAHAN / PENGGANTIAN	HASIL EVALUASI
		Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden		Umum	Pemilihan Umum	KPU)
	21	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih Berlaku	-	<ul style="list-style-type: none"> • Diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • untuk mendayagunakan arsip di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas kelembagaan, perlu mengatur mengenai jadwal retensi arsip sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan; 	<ul style="list-style-type: none"> • TETAP, masih sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas kelembagaan